



RINGKASAN EKSEKUTIF

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD)
KABUPATEN BANTUL
2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

I. Pendahuluan

Program pemerataan pembangunan yang dilakukan di Indonesia terjadi sangat kompleks, mengingat wilayah yang cukup luas dan didukung dengan jumlah penduduk yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan akan sumberdaya alam mengalami peningkatan. Pembangunan akan berdampak pada proses perubahan besar yang meliputi perubahan fisik wilayah, perubahan struktur sosial, struktur ekonomi, perubahan pola konsumsi, perubahan sistem nilai, perubahan teknologi, dan perubahan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Segala perubahan besar yang terjadi diakibatkan dari berbagai aktifitas seperti industri, sosio-ekonomi, pertanian, infrastruktur, perdagangan, dan jasa. Perubahan tersebut memberikan tekanan bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia, khususnya keanekaragaman hayati, air, udara, luasan hutan dan kawasan lindung, perubahan iklim serta cuaca.

Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam guna menunjang pembangunan dapat dikembangkan secara maksimal mungkin dengan risiko yang minim namun harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan yang berwawasan lingkungan harus menjadi prioritas pemerintah Indonesia dengan mendepankan nilai-nilai Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan yang harus dipenuhi setiap negara untuk tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan lingkungan saat meraih kesejahteraan ekonomi atau ekonomi hijau. Poin-poin utama dalam pembangunan berkelanjutan tersebut adalah memperkuat sumber-sumber dana dan

investasi untuk mendukung tindakan mitigasi bencana lingkungan, adaptasi dan alih teknologi ramah lingkungan terkait perubahan iklim. Hasil pemantauan dan evaluasi SDGs di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa pencapaian tujuan-tujuan SDGs ini masih banyak yang dinilai kurang, misalnya penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih terjangkau dan terbarukan, produksi pangan yang berkelanjutan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi serta konsumsi, kondisi ekosistem darat, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Keterbukaan terhadap akses informasi publik didukung oleh adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai badan publik, Pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelaksanaan pembangunan perlu didukung data dan informasi lingkungan hidup yang berkesinambungan, terukur, akurat dan transparan. Data dan informasi tersebut adalah merupakan bagian dari pelaksanaan unsur konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang mencerminkan keterkaitan hubungan sebab akibat dalam relasi antara lingkungan (ekosistem) dan manusia. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berkaitan dengan uraian peraturan perundang-undangan di atas maka dari berbagai data dan informasi lingkungan hidup tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bantul sebagai bahan kajian dan memutuskan kebijakan dalam melanjutkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2021 pada Pedoman Penyusunan Dokumen IKPLHD yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun 2022 berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor

S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tanggal 22 Februari 2022. Dokumen DIKPLHD Kabupaten Bantul Tahun 2021 ini disusun sebagai langkah dalam memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bantul tentang penyediaan informasi lingkungan hidup dan mengevaluasi kondisi lingkungan yang menyangkut perencanaan pembangunan suatu daerah.

Tujuan dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan ilmiah mengenai lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bantul sebagai acuan pengambilan kebijakan, dan perencanaan pembangunan
2. Menyediakan sumber informasi mengenai kondisi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bantul yang dapat diakses secara luas dan mudah oleh berbagai pihak yang terkait demi pembangunan dan kemakmuran masyarakat
3. Menyediakan sarana pemantauan kinerja pemerintah atas upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengurangi dan menanggulangi permasalahan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup bagi berbagai pihak di wilayah Kabupaten Bantul
5. Menyediakan informasi akurat bagi peringatan dini terhadap potensi permasalahan lingkungan hidup, yang dapat mendorong dilakukannya evaluasi dan langkah-langkah antisipasi.

II. ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN RESPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Aspek utama dalam kerangka DPSIR yang akan dianalisis, yaitu:

1. Faktor penggerak tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup (*driving force*) beberapa faktor penggerak antara lain faktor sosial kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan kemiskinan.

2. Indikator tekanan terhadap lingkungan (*pressure*) berupa aktivitas/ kegiatan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam yang akan menimbulkan tekanan lingkungan dan merubah keadaannya.
3. Kondisi lingkungan hidup dan kecenderungannya (*state*), Indikator ini menggambarkan kondisi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan prediksi situasi, kondisi dan pengembangannya di masa depan.
4. Setiap kegiatan atau aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam akan berdampak (*impact*) terhadap lingkungan.
5. Respon (*response*) masyarakat terhadap perubahan ini pada tingkat yang berbeda dalam bentuk aturan/legislasi baru, teknologi baru, perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan reformasi ekonomi.

Dalam laporan ini, analisis D-P-S-I-R akan dilakukan untuk 3 isu lingkungan prioritas yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Tata Guna Lahan
2. Kualitas Air
3. Kualitas Udara
4. Resiko Bencana
5. Perkotaan
6. Tata Kelola

A. TATA GUNA LAHAN

Driving Force

- a. Jumlah penduduk tercatat sebanyak 956.513 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,85%.
- b. Perubahan lahan hutan menjadi lahan terbangun untuk kawasan pemukiman dan industri terpadu tidak dapat dihindari seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan tekanan ekonomi.

- c. Sektor pariwisata juga akan mendorong pembukaan lahan baru untuk fasilitas pendukung, tanpa disadari terus mendorong terjadinya perubahan fungsi lahan serta tutupan vegetasi.

Pressure

- a. Perubahan lahan pertanian di Tahun 2015 - 2021 luas perubahan lahan pertanian sebesar 354,26 Ha.
- b. Bukaan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat jenis, yaitu, kehutanan, pertanian dan budidaya, tanah terbuka, serta tambang, namun pemamfaatannya belum optimal.
- c. Kebutuhan lahan untuk TPAS Piyungan yang saat ini telah mencapai empat kali lipat dari kapasitas normal 2.4 juta meter kubik sampah.

State

- a. Indeks tutupan lahan sebesar 55,21. hal ini masih belum sesuai target yang di rencanakan dalam RPJMD
- b. Ketidakesesuaian lahan terhadap rencana tata ruang wilayah
- c. Keanekaragam sumberdaya hutan di Kabupaten Bantul

Impact

- a. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa di beberapa Kapanewon
- b. Perubahan struktur pola ruang kawasan yang tidak sesuai peruntukannya
- c. Penurunan kualitas lahan Luas lahan kritis di kawasan hutan di Kabupaten Bantul pada tahun 2021 mencapai 113,62 ha.
- d. Pemanfaatan lahan yang melebihi daya dukung dan daya tampung.

Response

- a. Upaya Penangan Lahan Kritis Dengan Progam Penghijauan
- b. Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bantul melalui konservasi hutan, mangrove, flora dan fauna endemik

- c. Upaya penanganan kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan tidak berizin dengan pendekatan kepada warga melalui pembinaan.
- d. Penetapan regulasi penataan ruang dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 416 Tahun 2021.

B. KUALITAS AIR

Driving Force

- a. Pertumbuhan permukiman dan penduduk akan meningkatkan aktifitas domestik yang berdampak pada peningkatan volume limbah yang dapat mencemari kualitas air.
- b. Kondisi hidrogeologi yang bervariasi

Pressure

- a. Aktifitas domestik, pertanian, dan peternakan yang dapat berdampak pada pencemaran lingkungan
- b. Pemanfaatan sumberdaya air yang berlebihan
- c. Aktivitas pengelolaan dan mobilisasi sampah di TPA Piyungan menghasilkan air lindi yang dapat mencemari air tanah dan sungai.
- d. Kurangnya pemanfaatan embung dan semakin tingginya angka pemanfaatan airtanah sebagai sumber air baku.

State

- a. Tren indeks kualitas air sungai mencapai nilai 56 atau capaian naik 112% dari target RPJMD pada tahun 2021, namun parameter seperti TDS, TSS, dan Total Coliform masih melebihi bakumutu
- b. Kualitas air laut pada beberapa parameter masih menunjukkan melebihi baku mutu yaitu lapisan minyak, DO, dan amoniak
- c. Kualitas air tanah mengandung total coliform pada kawasan TPA Piyungan dan permukiman dekat industri >1898 jmlh/1000 ml.

Impact

- a. Terjadinya penurunan kualitas air
- b. Hilangnya spesies flora dan fauna di ekosistem sungai dan pesisir
- c. Menurunkan kualitas kesehatan masyarakat, peningkatan beban pencemar sungai dan menyebabkan biota air tercemar

Response

- a. Monitoring kualitas air secara berkala dan berkesinambungan
- b. Kewajiban Progam Membangun Sumur Peresapan Air Hujan
- c. Penerapan ijin lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan terutama industri
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan dan peningkatan pemanfaatan potensi air permukaan.

C. KUALITAS UDARA

Driving Force

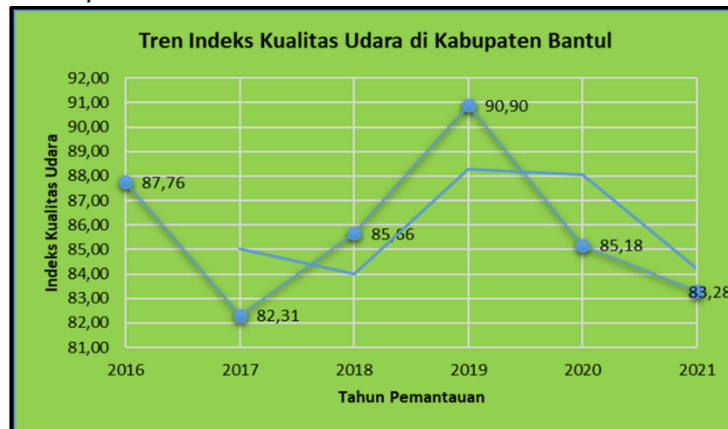
- a. Kabupaten Bantul sudah beradaptasi dengan Covid-19 sehingga mobilisasi masyarakat meningkat dan meningkatkan emisi di udara dan menurunkan kualitas udara ambien.
- b. Iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate).
- c. Rata-rata curah hujan bulanan di Bantul adalah 214.73 mm dan bulan tinggi curah hujan adalah November, Desember, Januari, dan Februari dengan suhu rata-rata yakni berkisar 26,33 °C.

Pressure

- a. Adaptasi kebiasaan baru terhadap Covid-19 sehingga mobilisasi masyarakat mengalami peningkatan yang disertai dengan emisi gas buang dari kendaraan bermotor.
- b. Jumlah kendaraan naik pada Tahun 2021 berjumlah 538.566 unit
- c. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor berakibat naiknya pemakaian bahan bakar dan kebutuhan sarana jalan

State

- a. Konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ di udara ambien Kabupaten Bantul terus menunjukkan kenaikan sehingga Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2021 juga ikut turun yakni menjadi 83,28.



Gambar 1. Grafik Tren Kualitas Udara Ambeien Kabupaten Bantul

- b. Hasil pemantauan pada tahun 2021 rerata per tahun kadar Nitrogen Dioksida (NO₂) di lokasi ini adalah 14,92 µ/m³. Masih jauh dibawah baku mutu menurut standar European Union (EU) Directives sebesar 40 µg/m³.

Impact

- a. Gangguan kesehatan masyarakat terutama saluran pernapasan
- b. Emisi Gas Rumah Kaca Akibat Mobilisasi Penduduk

Response

- a. Pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber tidak bergerak pemantauan kualitas udara secara periodik.
- b. Optimalisasi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- c. Pengukuran kualitas air hujan

D. RiSIKO BENCANA

Driving Force

- a. Kondisi geologi dan morfologi Kabupaten Bantul dimana Kabupaten Bantul dilalui Sesar Opak yang merupakan pemicu gempa bumi di darat.
- b. Sejarah kejadian bencana

Pressure

- a. Risiko bencana di Kabupaten Bantul terdapat dua bencana dengan risiko tinggi yaitu banjir dan kebakaran hutan/lahan. Sedangkan risiko bencana sedang meliputi, gempa bumi, tsunami, gelombang esktrim dan abrasi, cuaca esktrim, dan kekeringan.

State

- a. Kejadian bencana selama tahun 2021 dengan total kejadian sebanyak 130 kali, yaitu banjir sebanyak 8 kali pada empat Kapanewon, tanah longsor 103 kali, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 8 titik lokasi dan gempa bumi sebanyak 11 kali.

Impact

- a. Kerugian material akibat bencana alam
- b. Bencana alam juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Salah satu penyakit dampak bencana banjir adalah leptospirosis

Response

- a. Kegiatan penanganan bencana berupa pembuatan SPAH untuk mencegah banjir, reboisasi di lahan kritis, dan pembinaan
- b. Program penurunan risiko bencana di Kabupaten Bantul, yaitu Sekolah Siaga Bencana berjumlah 16 sekolah, Destana (Desa Tangguh Bencana) berjumlah 35 Kalurahan, dan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) berjumlah 14 personil.
- c. Sosialisasi mitigasi bencana alam dan non alam
- d. Pencegahan Bencana Longsor dan Angin Kencang

E. PERKOTAAN

Driving Force

- a. Perkembangan penduduk perkotaan menjadi semakin tinggi. Kondisi ini telah nampak di Kabupaten Bantul dimana penduduk Kawasan Perkotaan Yogyakarta (Kapanewon Banguntapan, Kasihan, dan Sewon) lebih banyak dari pada penduduk yang tinggal di pedesaan. Ketiga Kapanewon tersebut mengisi 33,40%
- b. Pola persebaran jumlah penduduk cenderung tidak merata. Beberapa Kapanewon yang dekat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) jumlah dan kepadatan penduduk yang lebih tinggi.
- c. Sikap dan perilaku masyarakat

Pressure

- a. Tata kelola sampah yang belum optimal
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat yang dilihat dari adanya 5 aduan lingkungan berkaitan tentang keberadaan sampah liar, 3 laporan terkait kebiasaan membakar sampah.

State

- a. Jumlah penduduk di Kabupaten Bantul adalah 956.513 jiwa, dengan asumsi produksi sampah per orang adalah 0,542 kg/hari, maka produksi sampah di Kabupaten Bantul adalah 516.517 Kg/Hari atau sekitar 516,51 ton perhari.
- b. Penggunaan air ledeng/PDAM tahun 2021 sebesar 7.601 rumah tangga, pemanfaatan tertinggi di Kapanewon Dlingo
- c. Aksesibilitas sarana sanitasi pada tahun 2021 di Kabupaten Bantul yang menggunakan tempat buang air besar sendiri sejumlah 2377.957 KK atau 89,78%. Sedangkan yang menggunakan IPAL Komunal dan MCK plus sebanyak 4.084 KK (10,22%)
- d. pencemaran dari kegiatan pariwisata yang meningkat

Impact

- a. Produksi limbah perkotaan yang meningkat
- b. Gangguan penyakit dan kesehatan masyarakat
- c. Pembuangan sampah di sungai

Response

- a. Sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R
- b. DLH Kabupaten Bantul dan DLHK Provinsi Yogyakarta melakukan proses pengkajian perluasan TPAS Piyungan yang direncanakan di Kalurahan Sitimulyo, Piyungan, namun masih menunggu zona transisi
- c. Patroli lingkungan Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampah
- d. Penanganan Pengelolaan Limbah B3
- e. Pengefektifan bank sampah dan kebijakan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat

F. TATA KELOLA

Driving Force

- a. Alokasi dana pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021 sebesar Rp. 28,493,524,519 yang bersumber dari APBD.
- b. Pertumbuhan PDRB di tahun 2021 untuk sektor konstruksi dan jasa mengalami kenaikan yang cukup drastis dari nilai -13,78 tahun 2020, menjadi 10,38 pada tahun 2021.

Pressure

- a. Aduan lingkungan meliputi pencemaran material sebanyak 3 aduan, persampahan sebanyak 2 aduan, pencemaran air sebanyak 7 aduan, dan pencemaran udara sebagai 27 aduan.
- b. LSM lingkungan hidup di Kabupaten Bantul tahun 2021 tercatat sebanyak 18 LSM, 12 di antaranya memiliki Akta Pendirian.

State

- a. Jumlah staff DLH Kabupaten Bantul sebanyak 105 personil, SD sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 11 orang, SLTA sebanyak 49 orang, Diploma sebanyak 7 orang, Sarjana S1 sebanyak 24 orang, dan Master/S2 sebanyak 12 orang.

Impact

- a. Tantangan dalam pemantauan kualitas lingkungan hidup
- b. Pengawasan ketaatan izin lingkungan didapatkan bahwa presentase perusahaan yang taat sebesar 91,4% (202 perusahaan) dan tidak taat sebesar 8,6% (19 perusahaan).

Response

- a. Memberi ruang dan kesempatan agar dilaksanakannya kegiatan atau program yang diinisiasi sendiri oleh masyarakat
- b. Pengawasan dan pembinaan lingkungan hidup
- c. Pemberian penghargaan pengelola lingkungan hidup
- d. Pelestarian kearifan lokal dalam menjaga lingkungan hidup

III. PENENTUAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Langkah Persiapan yang meliputi *review literatur* yakni kajian terhadap pustaka dan konsep-konsep pengelolaan lingkungan yang telah ada. Selanjutnya dilakukan pembentukan tim penyusun dokumen dan tenaga ahli Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kab. Bantul yang disahkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Langkah pelaksanaan yang meliputi identifikasi dan pengumpulan data pendukung baik data Primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di lapangan sesuai dengan

kebutuhan kajian. Tahap selanjutnya yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) dan Rapat Koordinasi awal dengan tim penyusun DIKPLHD.

Langkah penyusunan yang meliputi kompilasi data, analisis data, dan penyajian dokumen DIKPLHD. Kompilasi data dilakukan terhadap seluruh data, baik data sekunder maupun data primer. Pemilahan data berdasarkan isu-isu yang dirangkum dalam *Focus Group Discussion* (FGD).

Hasil dari *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan, menghasilkan ketetapan isu lingkungan prioritas yang akan menjadi landasan utama dalam pembahasan inovasi pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah Yang Belum Optimal dan Timbulan Sampah Masih Tinggi
2. Penurunan Kualitas Air
3. Dinamika alih fungsi lahan

IV. INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANTUL

Upaya inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Bantul meliputi kegiatan atau program sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang
2. Leontin Mas' dan M-KIA
3. Bantul Bersama (Bantul Bersih Sampah 2025) dan Dikal
4. Progam Penyusunan Rencana Induk Persampahan
5. Progam Perencanaan KDN TPST Regional Piyungan
6. Pengembangan Progam Kampung Iklim (PROKLIM)
7. Inovasi Produk Hukum Dalam Bidang Lingkungan
8. Pelestarian Kearifan Lokal Labuhan dan Merti Dusun
9. Optimalisasi Penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
10. Penghijauan Dalam Upaya Rehabilitasi Lahan Kritis
11. Progam Konservasi Sumber Daya Air

12. Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
13. Progam Kegiatan Gropyok Sampah
14. Peningkatan Fasilitas Sampah dan Kampanye Lingkungan

V. PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik terlepas dari alih fungsi lahan pertanian yang cukup tinggi, namun adanya regulasi tim pengendalian dan pengawasan tata ruang diharapkan laju alih fungsi lahan dapat disesuaikan dengan peruntukannya.
2. Tren indeks kualitas air sungai di Kabupaten Bantul yang mencapai nilai 56 atau naik 112% dari target RPJMD pada tahun 2021, namun parameter residu terlarut (TDS), residu tersuspensi (TSS), Total Coliform di beberapa sungai masih ada yang melebihi baku mutu.
3. Konsentrasi parameter SO₂ dan NO₂ di udara ambien Kabupaten Bantul menunjukkan kenaikan sehingga Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2021 juga ikut turun yakni menjadi 83,28.
4. Kejadian bencana tahun 2021 total kejadian sebanyak 130 kali, yaitu banjir sebanyak 8 kali pada empat Kapanewon, tanah longsor 103 kali, kebakaran hutan dan lahan sebanyak 8 titik lokasi dan gempa bumi sebanyak 11 kali
5. TPA Piyungan sudah melebihi kapasitas yang seharusnya, dengan luas hanya 12 hektar dengan kapasitas maksimal 2700000 M³ mengalami over kapasitas hingga sampai saat ini
6. Komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bantul mencapai 60,54% berasal dari rumah tangga sampah sisa makanan, jenis sampah kedua yaitu sampah plastik yang mencapai 24,33%.

7. Hasil pengawasan ketaatan izin lingkungan presentase jumlah perusahaan yang taat 91,4% (202 perusahaan), sedangkan yang tidak taat sebesar 8,6% (19 perusahaan).